

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, tuntutan terhadap reformasi politik di Indonesia telah merubah sistem kehidupan Negara. Dalam pemerintah sendiri, sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktek manajemen, sistem akuntansi keuangan perencanaan keuangan dan pembangunan, Sistem pengawasan dan pemeriksaan serta berbagai implikasi financial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Tuntutan terhadap paradigma *good governance* dalam seluruh kegiatan pun tidak dapat dihindari lagi. Sebagai konsep, *good governance* adalah hal baru yang digunakan sebagai upaya untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berimbang dan lingkungan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau yang biasa disingkat dengan KKN.

Reformasi yang diperjuangkan oleh seluruh lapisan masyarakat membawa perubahan dalam kehidupan politik nasional maupun daerah. salah satu agenda reformasi tersebut adalah adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah. berdasarkan TAP MPR No.XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, peraturan dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, pemerintah telah mengeluarkan satu paket kebijakan tentang otonomi daerah yaitu undang-undang No.32 Tahun 2004. Tentang pemerintah daerah dan undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah merupakan suatu

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Misi utama dari kedua undang-undang tersebut tak hanya berfokus pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi penyelenggaraan otonomi daerah juga telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintah. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta, pemerataan dan berkeadilan.

Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *good governance* yakni pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN.

Proses penyelenggaraan pemerintah di daerah didasarkan pada asas-asas berikut:

- Desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah
- Demokratisasi, yaitu kebebasan terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat
- Transparansi, yaitu keterbukaan dalam proses perencanaan penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah

- Akuntabilitas, yaitu prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penyelenggaraan mulai dari perencanaan penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

Setiap organisasi baik publik maupun swasta, pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai untuk mencapai tujuan organisasi tersebut diperlukan strategi yang diturunkan dalam bentuk program atau aktivitas agar implementasi strategi berjalan secara efektif dan efisien. Pengendalian manajemen merupakan keharusan dalam suatu organisasi yang memerlukan desentralisasi. Kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat terjadi karena adanya kelemahan atau kegagalan pada salah satu atau beberapa tahap dalam proses pengendalian manajemen sistem pengendalian manajemen berfokus pada cara-cara untuk mengimplementasikan strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan kata lain, pengendalian manajemen dapat mempengaruhi kinerja organisasi karena pengendalian manajemen berada dalam tahap dimana strategi dijalankan kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Instruksi presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diterbitkan untuk dapat mengukur kinerja instansi pemerintah. Instruksi ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Fenomena yang terjadi di dalam perkembangan instansi pemerintah di Indonesia dewasa ini adalah memburuknya pelaksanaan Sistem Pengendalian Manajemen (SPM)

lembaga-lembaga publik baik di pusat maupun di daerah. Sistem Pengendalian Manajemen dapat diartikan sebagai proses pengumpulan dan penggunaan informasi untuk menolong dan mengkoordinasikan perencanaan serta keputusan pengendalian dalam organisasi dan untuk memandu perilaku dari pada manajer beserta pegawai (Horngren,2006).

Didapati fakta-fakta dari lapangan yang menyebutkan tentang keenganan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKDP) untuk memenuhi kewajiban pelaporannya terhadap pusat data (<http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/14641/-skpd-pemprov-jawa-timur-malas-update-laporan>). Sedangkan disisi lain, pelaporan menjadi mekanisme penting bagi suatu organisasi untuk memenuhi fungsi evaluasi atas pelaksanaan aktivitas operasional berjalan

Sedangkan fenomena yang banyak di jumpai mengenai kinerja instansi pemerintah adalah kinerja instansi yang seringkali tak memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Contohnya di saat ditemukanya sejumlah infrastruktur jalan yang pembangunannya belum merata atau tidak tepatnya pembagian raskin (<http://www.metrosiantar.com/2012/pembagian-raskin-di-sipinggolpinggol-tidak-tepat-sasaran/>).

Untuk menilai kinerja instansi pemerintah daerah ditunjukan inspektorat. Tugas pokok inspektorat adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi dan kabupaten.

Penelitian mengenai pengendalian manajemen telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya,

seperti yang pernah dilakukan oleh Sofyan Anshori (Universitas Padjajaran Bandung tahun 2001) dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen Mutu Kantor Akuntan Publik terhadap Kinerja Auditor” serta penelitian yang dilakukan oleh Tasha Armanda Tene (Univrstias Padjajaran tahun 2007) dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen terhadap Kinerja Keuangan Pusat Laba Perusahaan” dan penelitian yang dilakukan oleh Erma Susi Yanti Hutagalung (Universitas Padjajaran tahun 2008) dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen terhadap Efisiensi Biaya Langsung Proyek Konstruksi”.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada unsure variabel dependen yang berbeda dari yang sebelumnya pernah dilaksanakan yaitu mengenai kinerja instansi pemerintah. Penulis tertarik meneliti lebih lanjut terkait instansi pemerintah karena melihat fakta dilapangan yang menunjukkan bahwa kurang maksimalnya kinerja instansi sebagai organisasi yang melayani kepentingan publik.

Atas dasar uraian diatas, mengingat begitu kompleks dan pentingnya pengaruh pengendalian manjemen terhadap kinerja instansi pemerintah,maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Instansi Di Pemerintahan Daerah”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian manajemen yang dilaksanakan dengan efektif oleh pemerintah daerah?
2. Sejauhmana sistem pengendalian manajemen berpengaruh terhadap kinerja instansi pada pemerintah daerah?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menilai sudahkah instansi pemerintah daerah menjalankan sistem pengendalian manajemen secara efektif.
2. Untuk mengetahui sejauhmana sistem pengendalian manajemen mampu mempengaruhi kinerja instansi pemerintah daerah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan manfaat bagi pihak-pihak yang berminat dan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun pihak-pihak yang dimaksud antara lain:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai sistem pengendalian manajemen yang dijalankan oleh instansi pemerintah daerah

dan untuk memenuhi prasyarat akademis untuk mengikuti sidang sarjana lengkap di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.

2. Bagi instansi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan yaitu pengetahuan, wawasan tentang teori-teori, praktik mengenai sistem pengendalian manajemen yang membantu kinerja instansi pemerintah.

3. Bagi pihak lain

Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna untuk menambah pengetahuan, menjadi bahan pembandingan penelitian, ataupun menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan bidang ini.